

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Eko Aji Sasono Putra
NPP. 29.0645

Asdaf Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Keuangan Publik

Email: ekoajisp.ea@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Covid-19 pandemic that hit Indonesia in early March 2020 had implications for the destruction of the country's economy and impacted all regions, including one in Bogor Regency because many people lost their livelihoods due to policies such as Large-Scale Social Restrictions (PSBB), so that many traders went out of business. Many of the company's employees were laid off. This government makes a policy by budgeting village funds for direct cash assistance to the poor, then carried out with Village Fund Direct Cash Assistance (DCA-Village Fund). **Purpose:** This study aims to know the effectiveness of the implementation of the distribution of DCA-Village Funds during the Covid-19 pandemic in Bogor Regency, to find out the factors that become obstacles in its execution, and to examine the efforts made to overcome the barriers in the implementation of the distribution of DCA-Village Funds in during Covid-19 pandemic in Bogor Regency. **Method:** This study is a qualitative research using a descriptive method with an inductive approach. This study uses the theory of effectiveness by Sutrisno in Amrizal et al. (2018:43). The technique of collecting data are done by interviews (15 informant), and documentation. **Result:** The results of the author's research are that the distribution of BLT-Village Funds during the Covid-19 pandemic in Bogor Regency has been effective. The obstacles found in implementing the distribution of BLT-Village Funds were the replacement of Beneficiary Family Data, the lack of public awareness, and there were still people who did not know the types of assistance. The efforts made by the Bogor Regency Government in overcoming the existing obstacles are making more detailed regulations to regulate the mechanism for determining KPM, monitoring by going directly to the field, and increasing the ability of the apparatus in verifying data and conducting socialization to provide a deeper understanding to the community about the types of assistance available. **Conclusion:** The distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (DCA-Village Fund) during the Covid-19 pandemic in Bogor Regency has been effective and has completely met the effectiveness indicators according to Sutrisno in Amrizal et al. (2018:43).

Keywords : Effectiveness, DCA-Village Fund, Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal Maret 2020 berimplikasi pada rusaknya perekonomian Negara dan berdampak kepada semua daerah termasuk salah satunya di Kabupaten Bogor dikarenakan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariaannya yang disebabkan oleh adanya kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga banyak pedagang gulung tikar dan banyak karyawan perusahaan yang

diberhentikan. Pemerintah menindaklanjuti hal ini membuat kebijakan dengan mengalokasikan dana desa untuk dijadikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin terdampak yang selanjutnya disebut dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bogor, mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bogor. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Amrizal dkk. (2018:43). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (15 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bogor telah berjalan efektif. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa yaitu adanya penggantian Data Keluarga Penerima Manfaat, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, dan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis bantuan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengatasi kendala yang ada yaitu membuat regulasi yang lebih detail untuk mengatur mekanisme penetapan KPM, melakukan monitoring dengan turun langsung ke lapangan serta meningkatkan kemampuan aparat dalam melakukan verifikasi data, dan melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang jenis-jenis bantuan yang ada. **Kesimpulan:** Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bogor telah berjalan efektif dan telah seluruhnya memenuhi indikator efektivitas menurut Sutrisno dalam Amrizal dkk. (2018:43).

Kata kunci : Efektivitas, BLT-Dana Desa, Pandemi *Covid-19*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi global pertama kali pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi *Covid-19* termasuk bencana non-alam berupa wabah penyakit yang diakibatkan oleh jenis *Coronavirus* baru yaitu Sars-CoV-2. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Di Negara Indonesia sendiri Presiden Republik Indonesia secara resmi menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi nasional pada tanggal 14 Maret 2020 seperti yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Bencana non alam pandemi *Covid-19* yang menimpa Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* menjelaskan bahwa pengutamaan penggunaan dana desa adalah digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Batasan ruang lingkup dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada permasalahan pandemi *Covid-19* yang menimpa Indonesia dan berdampak kepada semua daerah termasuk salah satunya di Kabupaten Bogor. Berdasarkan informasi yang penulis terima via telepon dari Kasi Pendapatan dan Kekayaan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, adanya pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat Kabupaten Bogor kehilangan mata pencahariannya akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga banyak pedagang yang gulung tikar karena adanya kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah sehingga berdampak terhadap pendapatan penduduk terlebih kepada penduduk miskin di desa yang juga tidak mendapatkan bantuan apapun baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah. Upaya

yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam menangani hal tersebut salah satunya sudah menjalankan kebijakan yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan anggaran dana desa menjadi bantuan langsung tunai yang telah dimulai dari bulan April tahun 2020 untuk 416 desa di 39 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Tabel 1.1

Realisasi Penyaluran BLT-Dana Desa Tahun 2020 di Kabupaten Bogor

No	Bulan	Realisasi Desa	Realisasi KPM	Realisasi Anggaran (dalam Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	April	416	89.703	53.821.800.000
2	Mei	416	89.618	53.770.800.000
3	Juni	416	89.618	53.770.800.000
4	Juli	415	83.598	25.079.400.000
5	Agustus	415	83.598	25.079.400.000
6	September	415	83.598	25.079.400.000
7	Oktober	169	23.041	6.912.300.000
8	November	154	20.522	6.156.600.000
9	Desember	141	18.108	5.432.400.000

Sumber : DPMD Kabupaten Bogor

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada data jumlah realisasi desa penerima BLT-Dana Desa terdapat perbedaan, terlebih pada jumlah realisasi desa pada bulan September ke bulan Oktober. Selanjutnya pada data realisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa juga menunjukkan statistik yang sama seperti pada data realisasi desa, hal ini dikarenakan jumlah desa yang menerima BLT-Dana Desa berbanding lurus dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa. Kemudian dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa realisasi anggaran BLT-Dana Desa yang disalurkan kepada KPM juga menyesuaikan hasil dari data realisasi desa dan data realisasi KPM. Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa berdasarkan pada data yang telah dipaparkan di atas menurut penjelasan dari Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor adalah karena masih banyak desa yang belum melaporkan realisasi pelaksanaan BLT-Dana Desanya sampai dengan per bulan September Tahun 2021 dan juga masih terdapat beberapa desa yang belum merampungkan penyaluran BLT-Dana Desanya, sehingga belum sepenuhnya data rekapitulasi realisasi pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa terlaporkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa DPMD Kabupaten Bogor, belum terealisasinya secara penuh penyaluran BLT-Dana Desa ini disebabkan oleh beberapa kendala yang mengakibatkan realisasi penerima manfaat yang mendapatkan BLT-Dana Desa tidak sesuai dengan target jumlah penerima manfaat berdasarkan pendataan awal, dikarenakan banyaknya perubahan data calon penerima manfaat yang dilakukan pemerintah desa karena adanya permasalahan administrasi, seperti Data KPM penerima BLT-Dana Desa yang diserahkan kepada DPMD terkadang tumpang tindih dengan bantuan yang lain, karena salah satu syarat penerima BLT-Dana Desa adalah diperuntukan bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19

yang belum menerima bantuan apapun baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Daerah. Pada kejadian ini penetapan data penerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Daerah berjalan lambat namun dilain sisi program BLT-Dana Desa harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu saat BLT-Dana Desa berjalan ternyata bantuan lain pun berjalan sehingga salah satu bantuan harus ada yang diputus atau digagalkan. Informan mengatakan karena BLT-Dana Desa dilaksanakan di desa, maka BLT-Dana Desa yang terpaksa diputus pemberiannya karena sulit untuk mengubah data yang ada di pusat. Hal ini menghambat penyaluran BLT-Dana Desa karena panitia pengurus BLT-Dana Desa harus mendata berkali-kali calon penerima manfaat agar penyalurannya bisa tepat sasaran, yakni sampai kepada masyarakat yang membutuhkan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sering terjadi keterlambatan penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima manfaat dimana terkadang bantuan baru cair setelah 3 (tiga) bulan atau dirapel (akumulasi beberapa bulan dibayarkan dalam satu waktu) karena adanya pendataan ulang, dengan ini jumlah KPM yang menerima BLT-Dana Desa tidak sesuai dengan target jumlah KPM berdasarkan pendataan awal. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di Kabupaten Bogor dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT”**.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang bantuan langsung tunai dana desa. Penelitian Burhanuddin berjudul Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 (Burhanuddin, 2021) penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Desa menjadi kendala dalam Implementasi program Bantuan langsung Tunai (BLT). Penelitian Sonia Apriani yang berjudul Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY (Sonia Apriani, 2021) menemukan bahwa dalam penelitian ini berisikan pengelolaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Harwidiensyah dengan judul Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa (Harwidiensyah, 2011) menerangkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai memberi manfaat terhadap masyarakat tetapi dalam jangka yang pendek.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pada penelitian ini penulis melakukan pembaharuan pada teori yang penulis gunakan, dimana penulis menggunakan konsep teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Amrizal dkk. (2018:43) yang terdiri dari atas beberapa dimensi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata yang akan digunakan untuk memecahkan masalah agar dapat mengetahui efektivitas pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat. Disamping itu pada penelitian ini penulis juga mengaitkan topik yang penulis ambil dengan fenomena yang sedang terjadi yakni pandemi *Covid-19*.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat dan faktor yang menjadi kendala serta upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam menanggulangi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.. Dalam melakukan pengumpulan data Primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa DPMD Kabupaten Bogor, Kepala Desa di Kabupaten Bogor, dan penerima manfaat BLT-Dana Desa di Kabupaten Bogor. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Rekapitulasi Realisasi Penyaluran BLT-Dana Desa Kabupaten Bogor Tahun 2020 serta dokumentasi foto kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bogor. Adapun analisisnya menggunakan teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles & Huberman dalam Sugiyono (2016:338) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno dalam Amrizal dkk. (2018:43). Teori tersebut terdiri dari rasio keuangan yaitu terdiri dari yang terdiri dari atas beberapa dimensi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan salah satu indikator ukuran efektivitas yang paling awal disebutkan oleh Sutrisno dalam Amrizal dkk. (2018:43) dalam teori efektivitasnya. Hal ini dikarenakan pemahaman program merupakan indikator paling utama yang harus dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Dengan adanya pemahaman pemangku kepentingan terhadap program yang sedang dijalankan, maka jalannya program tersebut akan lebih terkoordinir dan terorganisir dengan baik sehingga program yang dikerjakan dapat berjalan secara efektif. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur pemahaman program diantaranya adalah a) pengetahuan dan b) pendampingan.

Berkaitan dengan BLT-Dana Desa, bagi aparat pemerintah daerah sebagai pelaksana program harus memahami secara mendalam regulasi yang mengatur terkait pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk BLT-Dana Desa, memahami kriteria dan mekanisme penetapan KPM, serta memahami mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat juga harus memahami secara tepat mengenai manfaat dan peruntukan program tersebut. Dengan adanya pemahaman antara pelaksana dan penerima manfaat, diharapkan program BLT-Dana Desa ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan uraian jawaban dalam kegiatan wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan, menunjukkan bahwa jika mengacu pada indikator pemahaman program menurut

pendapat Sutrisno yakni dengan melihat sejauh mana pemahaman dari seseorang terhadap program yang sedang dijalankan baik dari aparat pemerintah yang bernaung dalam urusan BLT-Dana Desa maupun masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa di Kabupaten Bogor telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai program bantuan tersebut. Karena dalam pelaksanaannya telah dilakukan sosialisasi dari pemerintah yang paling tinggi sampai dengan ke Pemerintahan Desa, kemudian Pemerintahan Desa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa sehingga seluruh unsur baik pelaksana maupun penerima manfaat telah memiliki pemahaman terhadap program ini. Hanya saja memang masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara jenis-jenis bantuan yang ada.

3.2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran yang dimaksud sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya adalah apabila program yang direalisasikan memenuhi target yang telah ditetapkan. Kemampuan dari Pemerintah Desa dalam mengambil keputusan dalam memberi pelayanan publik kepada masyarakat pada dasarnya adalah adalah cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, serta menyelesaikan keperluan dan kebutuhan seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur tepat sasaran adalah a) ketepatan penerima manfaat dan b) kesesuaian program dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pemerintah Desa memiliki hak atau wewenang dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa dengan tepat sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi yang berlaku yang didukung dengan adanya pendataan dan survey oleh tim pendataan KPM di desa yang bersangkutan. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Desa lah yang dinilai paling dekat dengan masyarakat desa sehingga dianggap mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat desa. Sehingga dalam penentuan KPM diharapkan sesuai dengan sasaran yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Apabila sasaran yang dituju sudah tepat menandakan program berjalan dengan baik, karena tepatnya sasaran dapat memberikan outcome atau dampak yang besar kepada yang seharusnya menerima manfaat sehingga program dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan beberapa informan, menandakan bahwa pendataan penerima manfaat BLT-Dana Desa tahun 2020 di Kabupaten Bogor telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan instruksi yang tertera pada regulasi yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ditemukannya temuan selama proses monitoring baik dari pihak inspektorat, DPMD, maupun pihak Kecamatan dan pendamping desa yang terjun langsung dalam proses pendataan KPM sampai dengan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Oleh karena itu dapat dikatakan indikator tepat sasaran menurut Sutrisno dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di Kabupaten Bogor telah terpenuhi, dimana dalam hal ini sasaran dari setiap program dapat dikatakan efektif apabila kelompok masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

3.3. Tepat Waktu

Tepat waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apabila program berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan kata lain yaitu tingkat kedisiplinan aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dalam menyalurkan BLT-Dana Desa kepada masyarakat desa. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena ketepatan waktu adalah tolak ukur masyarakat telah merasakan manfaat dari suatu program atau belum. Dengan ketepatan waktu maka program akan berkelanjutan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sehingga akan berjalan secara efektif. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur tepat waktu yaitu a) kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan dan b) keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan mengatakan hal yang hampir sama mengenai indikator ini dimana pelaksanaan yang ditunjukkan cukuplah baik karena selain bertanggung jawab terhadap tugas mereka juga disiplin waktu dalam pencairan dana bantuan tersebut, karena pada dasarnya BLT-Dana Desa ini dicanangkan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi *Covid-19* demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di desa yang sesuai dengan kriteria penerima BLT-Dana Desa sehingga pencairan dana bantuan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Menurut apa yang telah diuraikan oleh sejumlah informan pada saat wawancara menerangkan bahwa terkait indikator tepat waktu menurut Sutrisno dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa tahun 2020 di Kabupaten Bogor telah terpenuhi, dimana yang dimaksud tepat waktu disini adalah apabila program berjalan sesuai waktu yang semestinya tidak ada yang tertunda atau bahkan batal dilaksanakan. Hal ini dapat kita lihat pada pemaparan narasumber baik aparatur pemerintah maupun penerima manfaat dimana mereka menjelaskan bahwa bantuan akan langsung cair apabila persyaratannya telah terpenuhi dan penerima manfaat pun tidak pernah mengalami penundaan karena hal teknis dalam menerima bantuan ini, kecuali penundaan yang disebabkan karena regulasi yang berlaku.

3.4. Tercapainya Tujuan

Pelaksanaan BLT-Dana Desa dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Tujuan yang dimaksud meliputi realisasi penyaluran yang memenuhi target yang telah ditetapkan, juga ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat.

Berlandaskan apa yang telah diuraikan oleh para informan menunjukkan bahwa indikator tercapainya tujuan menurut Sutrisno dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa tahun 2020 di Kabupaten Bogor telah terpenuhi, dimana penyaluran bantuan pada tahun 2020 telah sepenuhnya terealisasi.

3.5. Perubahan Nyata

Perubahan adalah beralihnya suatu kondisi atau keadaan dari sebelum ke sesudah dijalankannya suatu program. Perubahan nyata menjadi suatu hal yang paling diharapkan dalam sebuah program, apabila terdapat perubahan kearah yang lebih baik dan memberikan banyak manfaat terhadap kelompok sasaran maka menandakan program tersebut telah berjalan dengan baik dan efektif. Namun sebaliknya jika program tidak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik maka dapat dikatakan program tersebut gagal. Keberhasilan program dapat diukur dari sejauh mana perubahan nyata yang dihasilkan. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur perubahan nyata yaitu a) perubahan kondisi ekonomi dan b) keberhasilan program bagi penerima program.

Indikator perubahan nyata pada penelitian yang penulis lakukan lebih dirasakan kepada masyarakat penerima manfaat. Perubahan nyata dilihat dari peningkatan yang terjadi setelah dilaksanakannya penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu penulis melakukan kegiatan wawancara kepada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di beberapa desa di Kabupaten Bogor.

Melihat hasil wawancara yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa BLT-Dana Desa sangat bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria. Bantuan ini dapat memberikan tambahan atau bahkan menggantikan pendapatan masyarakat yang kurang mampu di tengah masa pandemi sehingga masyarakat dapat merasakan perubahan yang nyata yaitu ketika dihadapkan dengan kondisi yang sulit seperti saat ini, namun dengan adanya BLT-Dana Desa

masyarakat tetap merasakan kesejahteraan. Oleh karena itu dapat dikatakan indikator perubahan nyata menurut Sutrisno telah terpenuhi.

3.6 Diskusi Temuan Utama Peneliiian

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memberikan banyak dampak positif terlebih kepada masyarakat miskin di desa yang terdampak pandemi *Covid-19*. Program BLT-Dana Desa merupakan salah satu program yang diarahkan langsung Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Covid-19* dimana Pemerintah Pusat memerintahkan agar Pemerintah Desa menganggarkan dana desanya untuk dijadikan bantuan langsung berupa uang tunai untuk diberikan kepada masyarakat miskin di desa terdampak pandemi yang belum menerima bantuan apapun baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bogor sudah berjalan efektif baik dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, maupun perubahan nyata yang dihasilkan. Kendala yang ditemukan di lapangan diantaranya adanya penggantian data penerima manfaat yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan maksud agar seluruh masyarakatnya yang memang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan, dikarenakan dana desa yang dianggarkan untuk BLT-Dana Desa tidak dapat mencukupi seluruhnya sehingga per tiga bulan dilakukan penggantian data penerima manfaat. Kemudian walaupun pemerintah telah melaksanakan sosialisasi secara berkala tentang program BLT-Dana Desa kepada masyarakat desa namun dikarenakan karakter masyarakat yang berbeda-beda, masih saja terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui mengenai jenis-jenis bantuan apa saja yang ada sehingga menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat. Selain itu masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dimana saat pendataan calon penerima manfaat masih terdapat masyarakat yang tidak jujur jika mereka telah mendapatkan bantuan lain selain BLT-Dana Desa sehingga saat data diserahkan kepada pihak DPMD dan ditemukan adanya data penerima bantuan ganda maka data penerima manfaat BLT-Dana Desa akan diputus karena lebih sulit untuk mengubah data yang ada di pusat, hal ini lah yang menghambat penyaluran BLT-Dana Desa karena desa harus melakukan pendataan ulang dan membuat perkades baru.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sudah berjalan efektif ditandai dengan hasil penelitian melalui giat wawancara dan juga berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan pelaksanaan BLT-Dana Desa di Kabupaten Bogor telah memenuhi dimensi-dimensi yang menjadi tolak ukur efektivitas suatu program menurut Sutrisno dalam Amrizal (2018:43). Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa yaitu adanya penggantian Data Keluarga Penerima Manfaat, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, dan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis bantuan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengatasi kendala yang ada yaitu membuat regulasi yang lebih detail untuk mengatur mekanisme penetapan KPM, melakukan monitoring dengan turun langsung ke lapangan serta meningkatkan kemampuan aparat dalam melakukan verifikasi data, dan melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang jenis-jenis bantuan yang ada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni jarak dimana penelitian hanya menggunakan enam desa dari dua kecamatan sebagai sampel untuk dijadikan penelitian

dikarenakan terlalu luasnya wilayah Kabupaten Bogor sehingga penulis memiliki keterbatasan untuk dapat menjangkau keseluruhan wilayahnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bogor pada tahun-tahun berikutnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, D, A. H. Dalimunthe, dan Yusriati. 2018. Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Apriani, S. 2021. Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY. Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Burhanuddin. 2021. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Harwidiastiyah. 2011. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susilo, A, C. M. Rumende, C. W Pitoyo, W. D. Santoso, M. Yulianti, Herikurniawan, R. Sinto, G. Singh, L. Nainggolan, E. J. Nelwan, L. K. Chen, A. Widhani, E. Wijaya, Bramantya Wicaksana, M. Maksum, F. Annisa, C. Jasirwan, E. Yuniastuti. 2020. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini". Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, Jakarta: Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.